

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

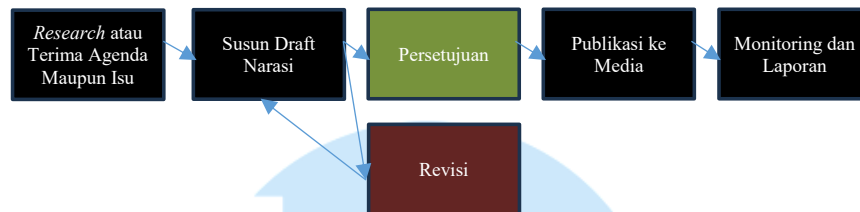
Di DPR RI, khususnya di bawah naungan Anggota Komisi VI Prof. Darmadi Durianto (A-177), bidang Humas dan komunikasi publik memiliki peranan penting dalam menyampaikan aktivitas legislatif kepada masyarakat secara terbuka dan konstruktif. Tim ini dipimpin oleh Bapak Dewantara, S. IP., selaku Tenaga Ahli Bidang Humas, yang mengoordinasikan strategi komunikasi eksternal dan membina hubungan kelembagaan dengan media serta publik.

Sebagai staf magang dalam bidang Humas, penulis terlibat langsung dalam berbagai aktivitas komunikasi publik yang mendukung fungsi representatif anggota dewan. Tugas-tugas yang dijalankan mencakup penyusunan dan penyebaran siaran pers ke media, membangun narasi komunikasi yang sejalan dengan pesan politik, memantau pemberitaan serta sentimen publik melalui media massa dan media sosial, serta menjalin komunikasi dengan wartawan, konstituen, dan pihak eksternal lainnya yang relevan. Biasa juga untuk penyusunan dan penyebaran siaran pers ke media dilakukan oleh penulis dengan persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang

Selama masa magang, bidang Humas/PR bertugas untuk memastikan aktivitas komunikasi politik dan representatif anggota dewan dapat tersampaikan secara efektif kepada publik. Tugas utama yang dijalankan meliputi penyusunan serta penyebarluasan pernyataan resmi (*press release*) kepada media, pengembangan narasi komunikasi politik yang sejalan dengan isu nasional maupun lokal, serta pemantauan pemberitaan dan sentimen publik

guna menyesuaikan arah pesan komunikasi. Selain itu, Humas juga melaksanakan komunikasi tatap muka melalui dialog bersama konstituen, yang menjadi sarana penting dalam menjaga kedekatan dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja anggota dewan.



Gambar 3.1 Alur Kerja Humas/*Public Relations Intern*

Gambar 3.1 menggambarkan alur kerja staf magang Humas di bawah koordinasi Tenaga Ahli Bidang Humas dari Anggota DPR RI Prof. Darmadi Durianto Komisi VI A-177. Alur kerja dimulai dari penerimaan agenda yang berkaitan dengan isu-isu nasional, kegiatan legislatif, atau permintaan pembuatan ucapan resmi untuk organisasi dan mitra terkait. Agenda tersebut biasanya disampaikan oleh Tenaga Ahli maupun langsung oleh anggota dewan.

Setelah menerima agenda, staf magang menyusun *draft* narasi komunikasi publik, seperti siaran pers, pernyataan resmi, atau materi ucapan. *Draft* tersebut kemudian diserahkan untuk direvisi dan disetujui, baik oleh Tenaga Ahli maupun langsung oleh anggota dewan dengan kecenderungan lebih banyak dikonsultasikan langsung kepada anggota dewan yang bersangkutan.

Setelah mendapat persetujuan akhir, narasi dipublikasikan melalui media massa ataupun kanal digital resmi. Tahap terakhir adalah proses *monitoring* dan pelaporan, di mana staf magang turut membantu memantau pemberitaan dan sentimen publik, serta menyusun laporan yang berfungsi sebagai bahan evaluasi komunikasi publik ke depannya

Adapun kegiatan magang yang dilakukan setiap harinya sebagai berikut:

MINGGU 1 (AGUSTUS 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	1 Agustus 2025	Orientasi kerja, pengenalan alur kerja Humas & media sosial DPR RI A-177.
2.	2 Agustus 2025	Brainstorming ide konten terkait isu Komisi VI & agenda politik Prof. Darmadi.
3.	3 Agustus 2025	Penyusunan draft narasi untuk caption media sosial & respons isu ekonomi.
4.	4 Agustus 2025	Monitoring media & analisis sentimen publik terhadap pemberitaan Komisi VI.
5.	5 Agustus 2025	Pengelolaan Instagram @darmadidurianto (reply, like, audience engagement).
6.	6 Agustus 2025	Dokumentasi kegiatan rapat internal & penyusunan narasi singkat.
7.	7 Agustus 2025	Penyusunan timeline awal konten untuk 2 minggu ke depan.
MINGGU 2 (AGUSTUS 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	8 Agustus 2025	Brainstorming konten Hari Kemerdekaan & isu UMKM.
2.	9 Agustus 2025	Draft caption + press release untuk kegiatan Komisi VI.
3.	10 Agustus 2025	Monitoring berita, pengumpulan link pemberitaan.
4.	11 Agustus 2025	Koordinasi media untuk agenda wawancara Prof. Darmadi.
5.	12 Agustus 2025	Upload & penjadwalan konten sosial media.
6.	13 Agustus 2025	Dokumentasi kegiatan internal.

7.	14 Agustus 2025	Review konten bersama supervisor.
MINGGU 3 (AGUSTUS 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	15 Agustus 2025	Brainstorming isu strategis pasca 17 Agustus.
2.	16 Agustus 2025	Penyusunan caption & graphic brief untuk desain.
3.	17 Agustus 2025	Monitoring sentimen publik (isu harga pokok, UMKM, ekonomi).
4.	18 Agustus 2025	Pengelolaan komentar & DM Instagram.
5.	19 Agustus 2025	Penyusunan draft press release kegiatan Komisi VI.
6.	20 Agustus 2025	Dokumentasi kegiatan serap aspirasi.
7.	21 Agustus 2025	Evaluasi mingguan performa konten.
MINGGU 4 (AGUSTUS 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	22 Agustus 2025	Timeline konten baru + briefing isu ekonomi.
2.	23 Agustus 2025	Draft caption + press release untuk kegiatan Komisi VI.
3.	24 Agustus 2025	Monitoring media & publik.
4.	25 Agustus 2025	Koordinasi dengan jurnalis TV.
5.	26 Agustus 2025	Pengelolaan media sosial.
6.	27 Agustus 2025	Dokumentasi kegiatan internal.
7.	28 Agustus 2025	Review konten bersama supervisor.
8.	29 Agustus 2025	Pembuatan timeline September + revisi konten bersama supervisor.
9.	30 Agustus 2025	Menyusun <i>press release</i> .
10.	31 Agustus 2025	Melakukan evaluasi bulanan.
MINGGU 1 (SEPTEMBER 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	1 September 2025	Brainstorming isu ekonomi & agenda Komisi VI.

2.	2 September 2025	Penyusunan draft caption & copywriting konten edukasi publik.
3.	3 September 2025	Monitoring media (isu inflasi, UMKM, BUMN).
4.	4 September 2025	Pengelolaan Instagram & interaksi audiens.
5.	5 September 2025	Penyusunan press release rapat Komisi VI.
6.	6 September 2025	Dokumentasi kegiatan rapat kerja/agenda internal.
7.	7 September 2025	Evaluasi performa konten minggu pertama.
MINGGU 2 (SEPTEMBER 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	8 September 2025	Brainstorming konten isu terkini.
2.	9 September 2025	Draft caption untuk infografis & konten hard news.
3.	10 September 2025	Monitoring berita nasional & regional.
4.	11 September 2025	Koordinasi dengan jurnalis untuk peliputan.
5.	12 September 2025	Upload konten & penjadwalan posting.
6.	13 September 2025	Dokumentasi kegiatan serap aspirasi.
7.	14 September 2025	Review konten + revisi jika diperlukan.
MINGGU 3 (SEPTEMBER 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	15 September 2025	Brainstorming konten edukasi publik mengenai kebijakan Komisi VI.
2.	16 September 2025	Penyusunan caption & script video penjelasan isu.
3.	17 September 2025	Monitoring media & analisis sentimen publik.
4.	18 September 2025	Pengelolaan komentar audiens & DM publik.

5.	19 September 2025	Penyusunan press release kegiatan dapil / rapat.
6.	20 September 2025	Dokumentasi kunjungan lapangan.
7.	21 September 2025	Evaluasi mingguan konten & engagement.
MINGGU 4 (SEPTEMBER 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	22 September 2025	Penyusunan timeline konten akhir bulan.
2.	23 September 2025	Draft narasi panjang untuk kegiatan Prof. Darmadi.
3.	24 September 2025	Monitoring media & rekap berita yang relevan.
4.	25 September 2025	Koordinasi media untuk agenda wawancara TV.
5.	26 September 2025	Pengelolaan unggahan & engagement IG.
6.	27 September 2025	Dokumentasi kegiatan rapat & publikasi kegiatan.
7.	28 September 2025	Evaluasi bulanan performa konten.
8.	29 September 2025	Penyusunan laporan singkat bulanan.
9.	30 September 2025	Penyusunan timeline konten Oktober.
MINGGU 1 (OKTOBER 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	1 Oktober 2025	Briefing isu dan brainstorming konten awal bulan.
2.	2 Oktober 2025	Penyusunan narasi panjang untuk konten kebijakan Komisi VI.
3.	3 Oktober 2025	Monitoring media (isu ekonomi rakyat & BUMN).
4.	4 Oktober 2025	Pengelolaan Instagram & interaksi audiens.
5.	5 Oktober 2025	Penyusunan press release rapat Komisi VI.
6.	6 Oktober 2025	Dokumentasi kegiatan rapat/dewan.

7.	7 Oktober 2025	Evaluasi performa konten minggu pertama.
MINGGU 2 (OKTOBER 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	8 Oktober 2025	Brainstorming konten edukasi publik (ekonomi & UMKM).
2.	9 Oktober 2025	Draft caption infografis & revisi skrip konten video.
3.	10 Oktober 2025	Monitoring pemberitaan nasional.
4.	11 Oktober 2025	Koordinasi media untuk wawancara/agenda publik.
5.	12 Oktober 2025	Unggah konten & penjadwalan posting.
6.	13 Oktober 2025	Dokumentasi kegiatan serap aspirasi.
7.	14 Oktober 2025	Review konten & revisi.
MINGGU 3 (OKTOBER 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	15 Oktober 2025	Penyusunan timeline konten pekan ketiga.
2.	16 Oktober 2025	Pengelolaan IG, respons komentar & DM publik.
3.	17 Oktober 2025	Monitoring media & analisis sentimen.
4.	18 Oktober 2025	Pembuatan press release kegiatan dapil/komisi.
5.	19 Oktober 2025	Dokumentasi rapat atau kegiatan kunjungan.
6.	20 Oktober 2025	Finalisasi konten untuk unggahan pekan ini.
7.	21 Oktober 2025	Evaluasi performa konten mingguan.
MINGGU 4 (OKTOBER 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	22 Oktober 2025	Penyusunan timeline konten akhir bulan.

2.	23 Oktober 2025	Penyusunan narasi panjang untuk publikasi.
3.	24 Oktober 2025	Monitoring berita & rekap isu nasional.
4.	25 Oktober 2025	Koordinasi media untuk agenda besar Komisi VI.
5.	26 Oktober 2025	Pengelolaan unggahan IG & engagement.
6.	27 Oktober 2025	Dokumentasi kegiatan rapat kerja.
7.	28 Oktober 2025	Evaluasi performa konten bulanan.
8.	29 Oktober 2025	Penyusunan laporan kegiatan bulanan.
9.	30 Oktober 2025	Finalisasi konten penutup Oktober.
10.	31 Oktober 2025	Penyusunan timeline November.
MINGGU 1 (NOVEMBER 2025)		
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	1 November 2025	Penyusunan evaluasi akhir magang (rekap konten & aktivitas).
2.	2 November 2025	Draft narasi kegiatan pamungkas.
3.	3 November 2025	Monitoring media & rekap isu nasional.
4.	4 November 2025	Pengelolaan IG (konten penutup).
5.	5 November 2025	Dokumentasi kegiatan terakhir.
6.	6 November 2025	Penyusunan laporan akhir magang.
7.	7 November 2025	Penyelesaian administrasi konten & dokumentasi.

Tabel 3.1 Kegiatan Saat Magang

3.2.1 Tugas Kerja Magang

Berikut adalah tugas utama yang dilakukan oleh seorang staf Humas Magang/*Public Relations Intern* selama pelaksanaan kerja magang.

A. Brainstorming Ide Konten

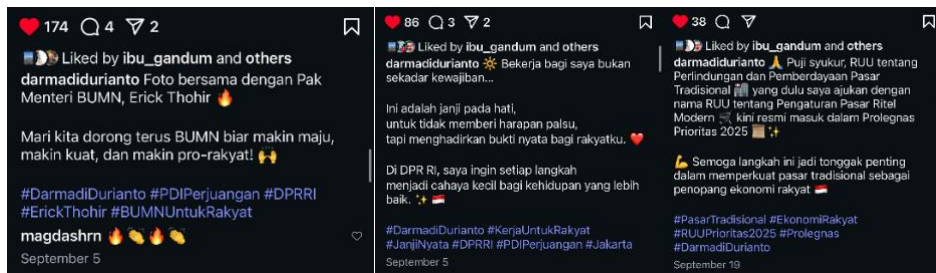
Tahap awal melibatkan sesi *brainstorming* untuk menghasilkan

ide kreatif yang relevan dengan isu politik terkini, kebijakan publik, dan aspirasi masyarakat. Proses ini tidak hanya penting untuk mengasah kreativitas, tetapi juga untuk memastikan kesesuaian dengan identitas lembaga dan karakter anggota dewan. Seperti dijelaskan oleh Wahid et al. (2024), media sosial kini menjadi sarana utama komunikasi politik sehingga ide konten harus dirancang agar mampu menarik perhatian publik sekaligus menyampaikan pesan politik yang jelas.

Dalam praktiknya, hasil *brainstorming* selalu didiskusikan secara mendalam bersama supervisor. Pada tahap ini, supervisor tidak hanya memberikan masukan mengenai ide yang telah dikumpulkan, tetapi juga mengarahkan tim untuk memahami konteks politik dari setiap isu yang akan diangkat. Diskusi biasanya mencakup analisis audiens target, tujuan pesan yang ingin disampaikan, potensi dampak publik, serta risiko komunikasi yang mungkin muncul. Melalui obrolan yang intens ini, staf magang memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana setiap konten harus disusun mulai dari sudut pandang narasi, pemilihan diksi, hingga gaya penyampaian *caption* agar tetap sesuai dengan karakter komunikasi Prof. Darmadi Duriyanto.

B. Penyusunan Draft Narasi

Setelah ide konten dipilih, penulis kemudian menyiapkan draft narasi yang menjadi dasar dalam penyusunan pesan komunikasi publik. Narasi ini dapat berupa siaran pers, pernyataan resmi, teks unggahan media sosial, maupun materi video singkat yang akan dipublikasikan melalui kanal digital anggota dewan. Dalam penyusunannya, setiap narasi harus disesuaikan dengan karakter personal anggota dewan, identitas lembaga, serta nilai-nilai representatif yang ingin disampaikan kepada publik. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga membangun citra yang kredibel, terbuka, dan dekat dengan masyarakat.



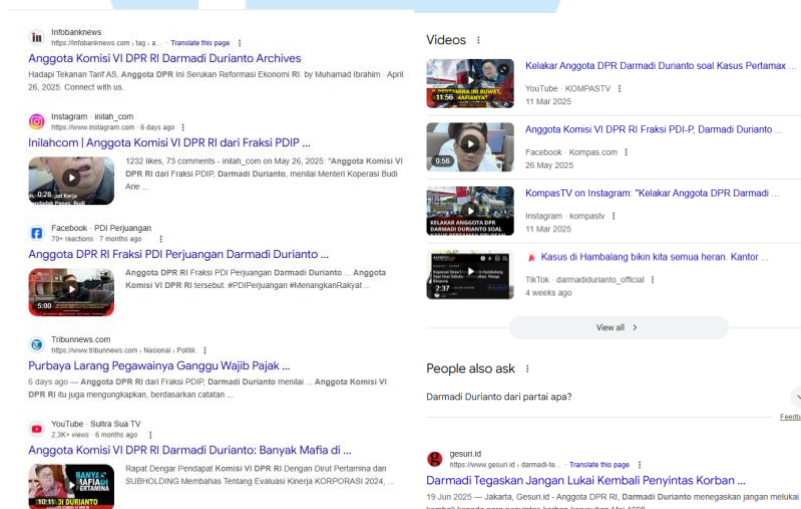
Gambar 3.2 Contoh *Caption*

Proses perumusan narasi dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial dan politik dari isu yang sedang berkembang. Penulis harus mampu mengemas pesan yang padat, relevan, dan komunikatif agar mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Kartini et al. (2023), tingkat transparansi informasi publik dalam lembaga legislatif sangat bergantung pada kejelasan pesan, konsistensi narasi, serta akurasi data yang disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, sebelum narasi dipublikasikan, dilakukan proses telaah mendalam bersama supervisor atau tenaga ahli anggota dewan untuk memastikan bahwa isi pesan tidak menimbulkan bias, kesalahan fakta, ataupun potensi kesalahpahaman publik.

Selain menekankan keakuratan dan nilai komunikasi, tahap ini juga menjadi momen pembelajaran bagi staf magang untuk memahami bagaimana strategi komunikasi politik diterapkan dalam praktik nyata. Diskusi dengan supervisor biasanya membahas aspek pemilihan diksi, nada komunikasi, gaya penyampaian, dan framing pesan agar tetap mencerminkan citra yang humanis dan aspiratif sesuai dengan karakter Prof. Darmadi Durianto. Dengan demikian, penyusunan narasi bukan sekadar kegiatan menulis, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi politik yang berperan penting dalam memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.

C. Monitoring Media dan Sentimen Publik

Selain menyusun narasi, staf magang juga melakukan pemantauan pemberitaan dan percakapan publik di media sosial. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pesan lembaga diterima serta menyesuaikan strategi komunikasi yang digunakan. Indrayanti et al. (2025) menunjukkan bahwa pola komunikasi legislatif tidak hanya berlangsung secara tatap muka, tetapi juga banyak dipengaruhi oleh interaksi digital yang terbentuk melalui media. Dengan melakukan *monitoring* media, tim Humas dapat mengetahui isu apa yang sedang berkembang dan bagaimana publik merespons, sehingga narasi komunikasi bisa segera disesuaikan dengan isu yang sedang dibahas atau sedang hangat-hangatnya.



Gambar 3.3 Contoh *Monitoring*

D. Komunikasi Tatap Muka dengan Konstituen

Selain melalui media, penulis juga turut mendukung berbagai kegiatan tatap muka anggota dewan dengan masyarakat, seperti forum dialog, kunjungan dapil, serta kegiatan penyerapan aspirasi. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun hubungan representatif antara wakil rakyat dan konstituennya. Melalui interaksi langsung, anggota

dewan tidak hanya mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga menunjukkan bentuk nyata dari kerja dan tanggung jawab politiknya. Dalam kegiatan tersebut, staf magang berperan membantu dokumentasi, menyusun narasi kegiatan, hingga merancang pesan publik yang menonjolkan nilai kedekatan dan kepedulian anggota dewan terhadap masyarakat.

Kegiatan tatap muka ini juga menjadi media penting untuk membangun kepercayaan publik. Seperti dijelaskan oleh Putri & Siregar (2024), komunikasi tatap muka antara pemerintah dan masyarakat mampu meningkatkan partisipasi publik serta memperkuat akuntabilitas lembaga melalui interaksi langsung yang bersifat dialogis. Hal ini terlihat ketika Prof. Darmadi Durianto secara konsisten turun ke daerah pemilihan untuk berdiskusi dengan warga, meninjau kondisi lapangan, dan menindaklanjuti berbagai keluhan secara konkret. Pendekatan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi wujud nyata dari kerja representatif dan kepedulian sosial yang memperkuat citra beliau sebagai wakil rakyat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, komunikasi tatap muka tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi strategi kerja nyata yang membangun kedekatan emosional dan kepercayaan jangka panjang antara anggota dewan dan masyarakat.

3.2.2 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang

Sebagai staf magang di bidang Humas di bawah naungan Anggota Komisi VI DPR RI, Prof. Darmadi Durianto, penulis memiliki tanggung jawab dalam mendukung aktivitas komunikasi publik yang berkaitan dengan isu kebijakan dan aspirasi masyarakat. Setiap aktivitas kehumasan yang dijalankan selalu mengacu pada strategi komunikasi politik yang telah ditetapkan, sehingga pesan yang disampaikan dapat selaras dengan citra lembaga.

Dalam praktiknya, penulis berperan dalam berbagai proses kerja, mulai dari penyusunan dan penyebarluasan *press release*, pengembangan narasi komunikasi politik, hingga pemantauan pemberitaan dan sentimen publik di media massa maupun media sosial. Selain itu, penulis juga ikut terlibat dalam mendukung komunikasi tatap muka anggota dewan dengan masyarakat, seperti forum dialog atau kegiatan serap aspirasi, yang bertujuan memperkuat hubungan representatif.

Dengan demikian, pengalaman magang ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis mengenai komunikasi publik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana strategi Humas dijalankan secara sistematis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Berikut adalah beberapa konsep dan teori komunikasi yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas magang tersebut:

A. Public Relations

Sebagai staf magang di bidang Humas di bawah naungan Anggota Komisi VI DPR RI, Prof. Darmadi Durianto, penulis memiliki tanggung jawab dalam mendukung aktivitas komunikasi publik yang berkaitan dengan isu kebijakan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Setiap kegiatan kehumasan yang dilakukan selalu berpedoman pada strategi komunikasi politik lembaga, dengan tujuan agar pesan yang disampaikan selaras dengan citra dan nilai representatif DPR RI. Dalam praktiknya, penulis tidak hanya berperan dalam penyusunan materi komunikasi, tetapi juga turut mendukung kegiatan lapangan yang berorientasi pada interaksi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat.

Kegiatan kehumasan tersebut berkaitan erat dengan penerapan teori *Two-Way Symmetrical Model* yang dikembangkan oleh James E. Grunig (1992) dalam buku *Excellence in Public Relations and Communication Management*. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif antara organisasi dan publik seharusnya berlangsung secara timbal balik dan berimbang. Hubungan yang dibangun harus bersifat

dialogis bukan hanya menyampaikan pesan satu arah, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan publik. Tujuan akhirnya adalah menciptakan *mutual understanding* dan *mutual benefit* antara lembaga dan masyarakat, sehingga komunikasi berfungsi tidak hanya sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan publik.

Sehingga teori ini diimplementasikan dalam kegiatan magang penulis melalui berbagai aktivitas kehumasan yang mengedepankan prinsip keterbukaan, empati, dan partisipasi publik, antara lain:

1. Pengelolaan Media Sosial dan Interaksi Digital

Penulis turut berperan dalam mendukung pengelolaan media sosial resmi yang menjadi kanal komunikasi antara anggota dewan dan masyarakat. Dalam kegiatan ini, komunikasi yang terbangun tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga membuka ruang dialog melalui kolom komentar dan pesan langsung dari publik. Pengelolaan media sosial dilakukan untuk fokus untuk membuat interaksi di Instagram @darmadidurianto memberikan tanggapan yang responsif supaya pengikut merasa senang jika komentarnya dijawab ataupun hanya disukai saja, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kedekatan serta rasa percaya masyarakat terhadap kinerja lembaga. Aktivitas ini menggambarkan praktik komunikasi dua arah yang sejajar dengan prinsip *Two-Way Symmetrical Model*, di mana media digital menjadi jembatan interaksi yang memungkinkan pertukaran pesan secara terbuka dan saling menghargai.



Gambar 3.4 Pengelolaan Sosial Media

2. Kegiatan Tatap Muka dan Serap Aspirasi Masyarakat

Komunikasi dua arah juga tampak dalam kegiatan lapangan seperti forum dialog, penyuluhan, sosialisasi kebijakan, hingga kegiatan ramah tamah yang dihadiri masyarakat. Dalam kegiatan ini, anggota dewan berperan menyampaikan informasi kebijakan atau program yang relevan, sementara masyarakat diberi ruang untuk mengemukakan aspirasi, kritik, maupun masukan secara langsung. Penulis berperan dalam mendukung persiapan komunikasi dan dokumentasi kegiatan, memastikan setiap pesan tersampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Kegiatan ini mencerminkan praktik komunikasi simetris yang menekankan kesetaraan dan saling pengertian antara lembaga publik dan konstituennya.



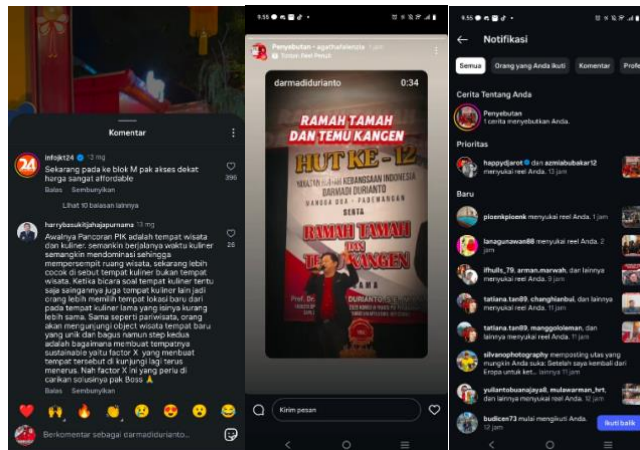


Gambar 3.5 Serap Aspirasi Masyarakat

Untuk kegiatan serap aspirasi penulis sempat menjadi pembicara dalam acara yang berfokus mengenai media sosial, seperti cara penggunaan media sosial untuk menunjang kegiatan politik maupun kehidupan sehari-hari mereka. Karena tim dari Prof. Darmadi Durianto yang didominasi oleh generasi yang kurang pemahaman akan media sosial sehingga perlu edukasi untuk mereka dalam menggunakan akun media sosial serta membuat *media share* Darmadi Durianto lebih banyak lagi.

3. Pemantauan Respons dan Evaluasi Publik

Selain kegiatan lapangan, penulis juga ikut berkontribusi dalam kegiatan pemantauan tanggapan masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan Komisi VI DPR RI, baik melalui media sosial maupun kanal publik lainnya. Hasil pemantauan ini menjadi bahan evaluasi untuk menilai efektivitas pesan komunikasi dan memahami ekspektasi publik terhadap lembaga. Dengan demikian, kegiatan monitoring ini sejalan dengan esensi teori *Two-Way Symmetrical*, yaitu proses mendengarkan dan menyesuaikan strategi komunikasi berdasarkan masukan dari masyarakat.



Gambar 3.6 Pemantauan Respons dan Evaluasi Publik

Melalui berbagai kegiatan tersebut, penerapan teori *Two-Way Symmetrical* terlihat jelas dalam praktik kehumasan di lingkungan DPR RI. Komunikasi yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada penyampaian pesan, tetapi juga membangun hubungan partisipatif yang berlandaskan kepercayaan dan keterbukaan. Humas berperan sebagai penghubung strategis yang menjaga keseimbangan antara citra lembaga dan kebutuhan publik, sehingga kehadiran anggota dewan dapat dirasakan secara nyata sebagai wakil rakyat yang responsif terhadap suara masyarakat.

B. Media Relations

Dalam dunia komunikasi politik, hubungan antara lembaga publik dan media memiliki peran sentral dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Menurut Nygren dan Johansson (2019) dalam buku *Close and Distant: Political Executive Media Relations in Four Countries*, hubungan antara aktor politik dan media tidak bersifat tunggal, melainkan kompleks dan saling bergantung (*mutual dependency*). Keduanya memiliki kebutuhan yang berbeda, namun saling melengkapi. Seperti yang dijelaskan oleh Nygren dan Johansson, “*Politicians need*

media attention to reach citizens and gain legitimacy, while journalists depend on political sources for information and credibility” (hlm. 10–12).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hubungan media dan lembaga politik bersifat simbiosis profesional. Politisi membutuhkan media untuk menyalurkan pesan dan membentuk citra publik, sedangkan media membutuhkan akses terhadap informasi politik yang kredibel. Namun, Nygren dan Johansson juga menekankan bahwa hubungan ini bersifat “*close and distant*” artinya, meskipun terdapat kedekatan dalam kerja sama, keduanya tetap menjaga jarak profesional dan otonomi masing-masing. Konsep ini menggambarkan keseimbangan antara kedekatan dan independensi, di mana media berperan sebagai jembatan informasi sekaligus pengawas (*watchdog*) terhadap kekuasaan politik.

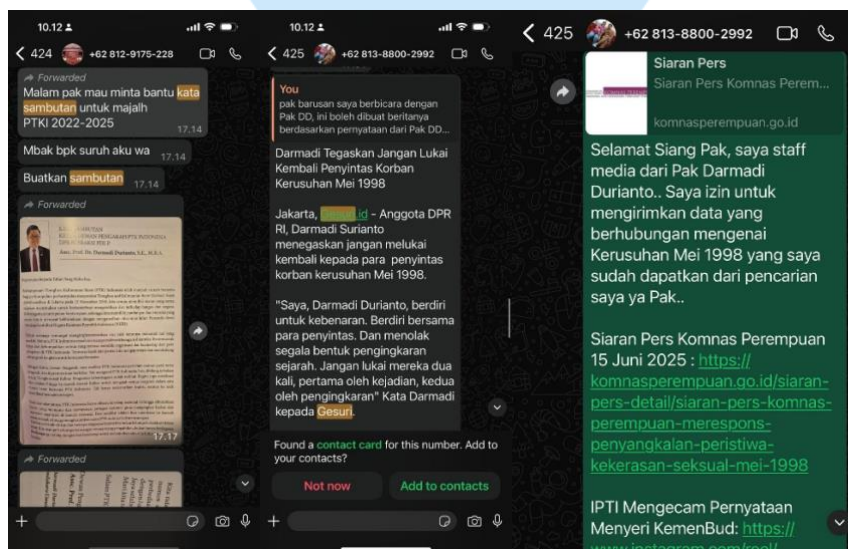
Konsep *close and distant relationship* tersebut sangat relevan dalam praktik kehumasan di lingkungan DPR RI. Dalam pengalaman penulis magang di bawah Anggota Komisi VI DPR RI, Prof. Darmadi Durianto, hubungan antara Humas dan media menjadi bagian penting dari strategi komunikasi politik lembaga legislatif. Sebagai staf yang mendukung fungsi komunikasi publik, peran Humas tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi, tetapi juga memastikan pesan politik disampaikan secara benar, seimbang, dan dapat diterima publik melalui media massa.

Sehingga teori ini diimplementasikan dalam kegiatan magang penulis melalui berbagai aktivitas media relations yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan profesionalitas hubungan dengan media, antara lain:

1. Penyusunan *Caption* dan Penyebarluasan *Press Release*

Penulis terlibat dalam proses penyusunan dan pengiriman *press release* yang berisi informasi mengenai kegiatan, pernyataan politik, dan pandangan Prof. Darmadi Durianto terhadap isu-isu

kebijakan publik ataupun saat turun ke daerah pemilihan. Setiap *press release* disusun dengan memperhatikan prinsip kejelasan pesan, akurasi data, serta kesesuaian gaya bahasa jurnalistik agar mudah dipahami dan dapat digunakan oleh media. Aktivitas ini menjadi bentuk nyata dari hubungan saling membutuhkan antara Humas dan media: lembaga menyediakan informasi yang valid dan mudah dikutip, sementara media berperan menyebarkan informasi tersebut kepada publik secara objektif. Penulis juga membuat *draft press release* dengan bantuan AI lalu setelah dibantu oleh supervisor untuk membenarkan penulisan ataupun diksi yang salah kemudian akan diserahkan ke media untuk diupload oleh mereka.



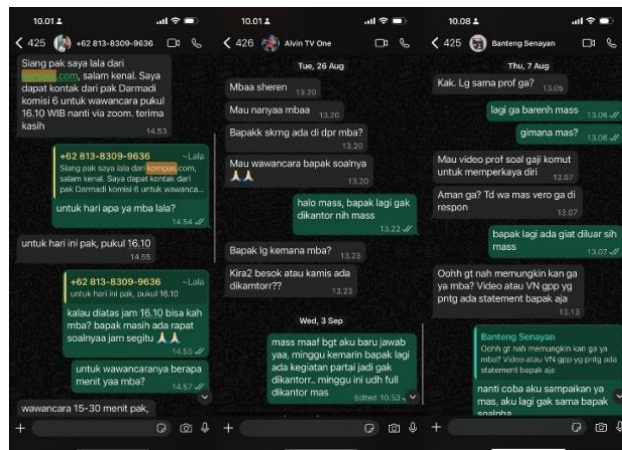
Gambar 3.7 Penyebaran *Press Release*



Gambar 3.8 Pembuatan *Caption*

2. Koordinasi dan Hubungan dengan Jurnalis

Dalam pelaksanaan kegiatan lapangan maupun konferensi pers, penulis turut membantu proses koordinasi dengan wartawan dan media peliput. Kegiatan ini dilakukan dengan menjunjung prinsip profesionalisme, di mana Humas membantu untuk menghubungkan anggota dewan dengan tim media yang ingin melakukan wawancara sehingga tugas penulis adalah menanyakan apakah dewan bersedia untuk wawancara ataupun mengikuti sebuah talkshow disuatu acara TV. Penulis sebagai Humas magang sama sekali tidak berusaha untuk mengintervensi isi pemberitaan. Sikap terbuka dan komunikatif menjadi kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan jurnalis. Hal ini sejalan dengan *konsep close and distant relationship*, di mana kedekatan dibangun melalui kepercayaan, tetapi jarak profesional tetap dijaga untuk menjamin independensi media.

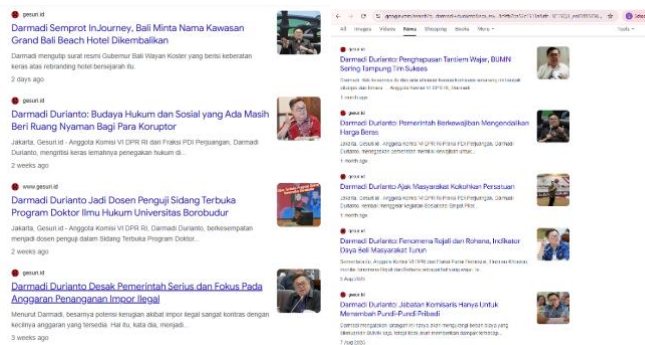


Gambar 3.9 Koordinasi Dengan Jurnalis

Dibanding mencoba untuk intervensi isi pemberitaan media, penulis lebih memilih untuk memberikan briefing kepada anggota dewan sebelum mereka wawancara ataupun tampil disebuah talkshow di TV, untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi nantinya.

3. Media Monitoring dan Analisis Pemberitaan

Penulis juga ikut dalam kegiatan pemantauan pemberitaan terkait isu-isu yang melibatkan Komisi VI DPR RI dan kegiatan Prof. Darmadi Durianto. Kegiatan ini dilakukan secara manual dengan memanfaatkan media sosial ataupun *search engine* seperti google yang dimana bertujuan untuk menilai arah opini publik dan persepsi media terhadap lembaga. Hasil pemantauan kemudian dijadikan dasar dalam menyusun strategi komunikasi selanjutnya. Proses ini menunjukkan bahwa hubungan antara media dan lembaga bersifat dua arah lembaga tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan dan menyesuaikan pendekatan komunikasinya berdasarkan reaksi media dan publik.



Gambar 3.10 *Media Monitoring*

4. Pembuatan *Timeline Content*

Dalam kegiatan magang di bawah naungan Anggota Komisi VI DPR RI, Prof. Darmadi Duriyanto, penulis turut berperan dalam membantu penyusunan timeline konten media sosial yang menjadi panduan utama dalam proses publikasi dan komunikasi digital lembaga. Timeline konten ini berfungsi sebagai content roadmap yang mengatur waktu, tema, dan format unggahan agar strategi komunikasi publik berjalan secara terencana, konsisten, dan relevan dengan agenda kegiatan anggota dewan.

Pembuatan timeline dimulai dari hasil sesi brainstorming ide bersama tim Humas, di mana setiap ide konten akan dipilah berdasarkan urgensi isu, relevansi politik, serta nilai informatif bagi publik. Setelah ide ditetapkan, penulis membantu menyusun urutan jadwal unggahan yang menyesuaikan dengan agenda kegiatan Prof. Darmadi Duriyanto, seperti rapat kerja Komisi VI, kunjungan lapangan, forum serap aspirasi, maupun pernyataan sikap terhadap isu ekonomi dan kebijakan publik.

Selain menyesuaikan dengan jadwal kegiatan, penulis juga memperhatikan momen publik yang strategis, seperti momentum hari nasional, isu ekonomi aktual, atau tren percakapan publik di media sosial. Hal ini dilakukan agar setiap unggahan tidak hanya

sekadar dokumentasi, tetapi juga memiliki nilai komunikasi politik yang kuat dan dapat menarik perhatian masyarakat.

Dalam praktiknya, timeline konten yang penulis buat juga bersifat fleksibel, karena agenda politik sering kali berubah mendadak. Oleh sebab itu, penulis bekerja sama dengan staf Humas lain dan tenaga ahli untuk memperbarui jadwal unggahan apabila terjadi perubahan kegiatan atau muncul isu baru yang perlu segera dikomunikasikan ke publik. Proses revisi ini menuntut kemampuan adaptasi tinggi dan koordinasi cepat agar publikasi tetap tepat waktu dan sesuai dengan arah pesan politik lembaga.

Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mendalam bahwa penyusunan timeline konten di lingkungan legislatif bukan sekadar pengaturan jadwal unggahan, tetapi merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang terintegrasi. Timeline membantu menjaga ritme komunikasi agar lembaga tetap aktif di ruang publik, pesan yang disampaikan selaras dengan citra representatif anggota dewan, dan publik dapat menerima informasi secara konsisten serta kredibel.

Timeline Konten Harian Darmadi Durianto Agustus – Oktober 2025

No	Hari/Tanggal	Tema Konten	Keterangan Singkat
1	Senin, 4 Agustus 2025	Rapat dengan pendapat Komisi	Membahas isu BP Batam dan perlindungan war
2	Selasa, 5 Agustus 2025	Rapat kerja Komisi VI	Fokus pada UMKM dan ekonomi rakyat
3	Rabu, 6 Agustus 2025	Turun ke Dapil	Bertemu masyarakat untuk edukasi publik
4	Kamis, 7 Agustus 2025	Rapat dengan pendapat Komisi	Diskusi terkait PKBB dan program sosial
5	Jumat, 8 Agustus 2025	Rapat kerja Komisi VI	Evaluasi kegiatan UMKM & aspirasi rakyat
6	Sabtu, 9 Agustus 2025	Turun ke Dapil	Kunjungan ke lokasi proyek dan warga setempat
7	Minggu, 10 Agustus 2025	Konten sosial media	Update kegiatan Komisi VI #KomisiVI
8	Senin, 1 September 2025	Rapat kerja Komisi VI	Pembahasan program ekonomi lokal
9	Selasa, 2 September 2025	Turun ke Dapil	Monitoring proyek dan konsultasi warga
10	Rabu, 3 September 2025	Rapat dengan pendapat	Isu PKBB dan kegiatan sosial masyarakat
11	Kamis, 4 September 2025	Rapat kerja Komisi VI	Fokus pada UMKM dan aspirasi rakyat
12	Jumat, 5 September 2025	Turun ke Dapil	Bertemu kelompok usaha kecil menengah
13	Sabtu, 6 September 2025	Konten sosial media	Highlight kegiatan Komisi VI #KomisiVI
14	Minggu, 7 September 2025	Rapat internal	Evaluasi program mingguan Komisi VI
15	Rabu, 1 Oktober 2025	Kunjungan kerja ke Bali	Monitoring proyek dan pertemuan masyarakat k
16	Kamis, 2 Oktober 2025	Grand Bali Beach Hotel	Desakan kembalihan nama Grand Bali Beach
17	Jumat, 3 Oktober 2025	Temu kangen & ramah tamah	Bertemu warga dan tim pendukung di Bali
18	Sabtu, 4 Oktober 2025	Puan Maharani rapat paripurna	Mendampingi Ketua DPR RI
19	Minggu, 5 Oktober 2025	Kegiatan sosial	Apresiasi untuk tim & masyarakat lokal

Gambar 3.11 *Timeline* Konten

5. Evaluasi dan Penguatan Citra Lembaga

Berdasarkan hasil *monitoring* dan hubungan dengan media, penulis turut berkontribusi dalam penyusunan rekomendasi komunikasi publik yang diarahkan untuk memperkuat citra lembaga. Upaya ini dilakukan dengan memastikan bahwa informasi yang beredar di media selaras dengan nilai-nilai representasi DPR RI sebagai lembaga yang terbuka, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, fungsi media relations tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, penerapan teori *Close and Distant Relationship* terlihat jelas dalam praktik hubungan media di lingkungan DPR RI. Humas berperan menjaga keseimbangan antara kebutuhan lembaga untuk memperoleh eksposur publik dan hak media untuk tetap independen dalam pemberitaan. Hubungan yang dibangun

bersifat saling menghargai dan berlandaskan profesionalitas, sehingga citra lembaga dapat terjaga secara kredibel di hadapan masyarakat.

3.3 Kendala yang Ditemukan

Selama menjalani magang di bidang Humas di bawah naungan Anggota Komisi VI DPR RI, Prof. Darmadi Durianto, penulis menghadapi sejumlah kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi publik dan pengelolaan konten digital. Tantangan tersebut muncul di setiap tahap pekerjaan, mulai dari perencanaan ide hingga pelaksanaan kegiatan lapangan. Kendala-kendala ini menggambarkan kompleksitas kerja Humas politik yang menuntut profesionalitas tinggi, sensitivitas publik, serta ketepatan pesan dalam menjaga citra lembaga.

1. Kendala dalam Tahap Brainstorming Ide Konten

Pada tahap awal perencanaan, penulis sering menghadapi tantangan dalam menentukan ide konten yang relevan dan tetap sejalan dengan karakter lembaga. Tidak semua isu kebijakan publik dapat dikemas dengan ringan tanpa mengurangi substansi politik. Selain itu, perubahan tren media sosial yang sangat cepat membuat ide yang awalnya sesuai bisa segera kehilangan momentum. Proses brainstorming juga memerlukan pertimbangan matang agar ide yang diangkat tidak menimbulkan interpretasi yang salah terhadap kebijakan lembaga maupun pribadi anggota dewan.

2. Kendala dalam Penyusunan Draft Narasi

Dalam proses penulisan narasi, penulis menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara bahasa yang komunikatif dan substansi politik yang akurat. Narasi harus menarik, mudah dipahami, serta mewakili posisi lembaga secara resmi, namun juga tidak boleh menyinggung atau menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kalimat harus disusun dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan sensitivitas publik terhadap isu tertentu. Terkadang, revisi mendadak juga perlu dilakukan karena perubahan informasi atau arahan komunikasi baru dari pimpinan. Kondisi ini

menuntut ketelitian, kecepatan berpikir, dan kemampuan membaca situasi sosial agar pesan yang disampaikan tetap informatif, empatik, dan etis.

3. Kendala dalam Monitoring Media dan Analisis Sentimen Publik

Dalam kegiatan media monitoring dan analisis sentimen publik, penulis menemui kendala dalam mengelola data yang besar dan dinamis. Sebagian besar proses pemantauan dilakukan secara manual, yang memerlukan waktu dan ketelitian tinggi. Selain itu, opini publik di media sosial bersifat fluktuatif dan mudah dipengaruhi oleh isu yang sedang viral, sehingga analisis harus terus diperbarui untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Kondisi ini membuat proses evaluasi komunikasi menjadi lebih kompleks dan memerlukan kemampuan adaptasi terhadap perubahan opini publik yang cepat.

4. Kendala dalam Pembuatan Timeline Konten

Dalam penyusunan timeline konten, penulis menghadapi tantangan dalam menyesuaikan jadwal publikasi dengan agenda kegiatan anggota dewan yang padat dan sering berubah. Revisi jadwal unggahan harus dilakukan berkali-kali agar publikasi tetap sesuai dengan isu aktual. Selain itu, pekerjaan seringkali berlangsung di luar jam kerja normal, termasuk pada akhir pekan (hari Minggu), ketika ada kegiatan lapangan atau acara yang perlu segera dipublikasikan. Situasi ini menuntut kemampuan manajemen waktu dan koordinasi yang baik agar semua proses publikasi tetap berjalan sesuai rencana tanpa mengorbankan kualitas konten.

5. Kendala dalam Komunikasi Tatap Muka dengan Konstituen

Dalam mendukung kegiatan tatap muka seperti forum dialog, penyuluhan, dan penyerapan aspirasi, penulis menghadapi tantangan dalam menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens yang memiliki latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam. Keterbatasan waktu kegiatan dan kondisi lapangan yang dinamis juga membuat proses dokumentasi serta pencatatan aspirasi masyarakat tidak selalu optimal. Hal ini menuntut kesiapan dan

ketelitian tinggi agar pesan lembaga tetap dapat disampaikan secara jelas dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

6. Kendala dalam Jam Kerja

Selama magang, penulis menghadapi kendala berupa jam kerja yang tidak menentu. Kegiatan kedewanan dan agenda komunikasi publik sering berubah secara tiba-tiba menyesuaikan agenda politik nasional, rapat komisi, serta kebutuhan publikasi yang bersifat real time. Hal ini membuat ritme kerja menjadi dinamis dan sulit diprediksi.

7. Kendala dalam Administrasi Magang Track 2

Penulis juga mengalami kendala terkait persyaratan administrasi Magang Track 2 dari FIKOM UMN, khususnya dalam penentuan supervisor. Supervisor dari lembaga pemerintahan umumnya tidak memiliki akun LinkedIn meskipun memiliki pengalaman profesional puluhan tahun. Hal ini menyulitkan proses verifikasi persyaratan karena LinkedIn merupakan salah satu dokumen yang diwajibkan oleh fakultas.

Kendala-kendala tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kegiatan komunikasi publik di lingkungan DPR RI tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga kepekaan sosial, etika komunikasi, dan kesiapan menghadapi perubahan yang cepat. Melalui berbagai tantangan ini, penulis memperoleh pengalaman berharga dalam memahami bagaimana komunikasi politik yang profesional dijalankan dengan tetap menjunjung transparansi, empati, dan tanggung jawab publik.

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan

Dalam menghadapi berbagai kendala selama pelaksanaan magang di bidang Humas di bawah naungan Anggota Komisi VI DPR RI, Prof. Darmadi Duriyanto, penulis berupaya menemukan solusi agar setiap kegiatan komunikasi publik tetap dapat berjalan secara efektif dan profesional. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan koordinasi, kreativitas, dan fleksibilitas kerja sesuai dengan karakteristik lingkungan lembaga politik yang dinamis.

1. Upaya Mengatasi Kendala pada Tahap Brainstorming Ide Konten

Untuk mengatasi kendala dalam mencari ide yang relevan dan menarik, penulis aktif melakukan riset kecil terhadap tren media sosial dan isu-isu kebijakan terkini yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi VI DPR RI. Selain itu, penulis berdiskusi rutin dengan tim Humas dan tenaga ahli untuk memastikan bahwa ide konten tidak hanya kreatif, tetapi juga tetap sejalan dengan nilai lembaga dan tidak menimbulkan interpretasi negatif. Pendekatan kolaboratif ini membantu menghasilkan ide yang segar sekaligus aman secara politis.

2. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penyusunan Draft Narasi

Untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun narasi yang komunikatif namun sensitif terhadap publik, penulis menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan diksi dan sudut pandang. Sebelum publikasi, setiap draf narasi dikonsultasikan terlebih dahulu dengan supervisor atau tenaga ahli untuk mendapatkan masukan terkait kelayakan bahasa dan potensi sensitivitas sosial. Penulis juga mempelajari gaya komunikasi publik yang digunakan oleh lembaga resmi DPR RI serta menyesuaikan gaya bahasa agar tetap sopan, empatik, dan representatif. Dengan cara ini, narasi yang disusun menjadi lebih aman secara politis dan tetap relevan dengan konteks publik.

3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Monitoring Media dan Analisis Sentimen Publik

Dalam menghadapi keterbatasan waktu dan alat pemantauan, penulis berinisiatif membuat format laporan media monitoring yang lebih ringkas dan efisien. Format ini memuat ringkasan isu utama, arah sentimen, serta rekomendasi strategi komunikasi singkat yang langsung dapat ditindaklanjuti. Selain itu, penulis memanfaatkan fitur pencarian dan hashtag tracking di media sosial untuk mempercepat proses identifikasi isu. Langkah ini membantu tim Humas untuk tetap tanggap terhadap isu publik dan segera menyesuaikan pesan komunikasi apabila dibutuhkan.

4. Upaya Mengatasi Kendala dalam Pembuatan Timeline Konten

Untuk menjaga ketepatan jadwal publikasi meskipun agenda kerja sering berubah, penulis berinisiatif membuat timeline cadangan atau alternatif (backup plan) yang berisi beberapa konten bersifat netral dan evergreen, seperti kutipan inspiratif, infografis capaian kerja, atau konten edukatif. Konten-konten ini dapat dipublikasikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan agenda mendadak. Penulis juga membangun komunikasi intens dengan staf Humas lain agar setiap perubahan kegiatan segera diinformasikan, sehingga revisi timeline bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu, manajemen waktu diperbaiki dengan membuat prioritas kerja harian agar pekerjaan yang melewati jam kerja atau akhir pekan tetap terkontrol tanpa mengganggu produktivitas.

5. Upaya Mengatasi Kendala dalam Komunikasi Tatap Muka dengan Konstituen

Untuk mengatasi kendala komunikasi di lapangan, penulis mempersiapkan materi dan briefing singkat sebelum kegiatan dimulai agar lebih memahami audiens yang akan dihadapi. Selama kegiatan berlangsung, penulis berupaya aktif mendengarkan dan mencatat poin-poin penting aspirasi masyarakat secara langsung untuk meminimalkan kesalahan interpretasi dalam pelaporan. Setelah kegiatan selesai, hasil dokumentasi dan catatan segera disusun kembali dalam bentuk ringkasan agar mudah digunakan sebagai bahan publikasi dan evaluasi oleh tim Humas. Pendekatan ini membantu menjaga

akurasi pesan dan memperkuat hubungan representatif antara anggota dewan dan masyarakat.

6. Upaya Mengatasi Kendala dalam Jam Kerja

Untuk mengatasi dinamika jam kerja yang tidak menentu, penulis melakukan penyesuaian melalui manajemen waktu yang fleksibel. Penulis tetap memprioritaskan agenda-agenda utama dan menyiapkan ruang waktu cadangan untuk menghadapi perubahan mendadak pada kegiatan kedewanan maupun publikasi digital. Selain itu, komunikasi intensif dengan mentor lapangan menjadi langkah penting agar alur pekerjaan tetap terkontrol meskipun jadwal sering berubah.

7. Upaya Mengatasi Kendala dalam Administrasi Magang Track 2

Dalam menghadapi kendala supervisor yang tidak memiliki akun LinkedIn, penulis berinisiatif untuk meminta alternatif persyaratan kepada program studi. Pihak prodi kemudian memberikan ketentuan pengganti berupa kewajiban melampirkan *Curriculum Vitae (CV)* dari supervisor sebagai verifikasi profesional. Setelah penulis memenuhi persyaratan tersebut, program studi akhirnya memberikan persetujuan resmi untuk pelaksanaan Magang Track 2 di DPR RI.

Melalui berbagai langkah tersebut, kendala yang dihadapi selama magang dapat diatasi secara bertahap dengan mengandalkan komunikasi terbuka, koordinasi yang baik, serta kreativitas dalam menyusun strategi kerja. Pengalaman ini memberikan pemahaman bagi penulis bahwa bekerja di bidang Humas politik tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan mental, fleksibilitas, dan etika komunikasi publik yang kuat agar pesan lembaga dapat tersampaikan secara efektif dan diterima positif oleh masyarakat.